

DAFTAR PUSTAKA

- Asmarani, N. G. C. (2021). DJP Terbitkan Surat Edaran Baru Soal Penghapusan NPWP Bendahara. <https://news.ddtc.co.id/djp-terbitkan-surat-edaran-baru-soal-penghapusan-npwp-bendahara-32791>
- DDTCNews. NPWP Bendahara Pemerintah Sudah Dihapus dari Administrasi DJP. (2021). <https://news.ddtc.co.id/npwp-bendahara-pemerintah-sudah-dihapus-dari-administrasi-djp-32767>
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. (2021). Realisasi APBN Per 30 November 2021. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/pengumuman/153-apbn.html>
- Fadli, N., & Zulfayani, A. (2021). Analisis Tingkat Kepatuhan Bendahara Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam Penyetoran Pajak. *AkMen*, 18(3), 245–255.
- Hardiningsih, P. (2014). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi kasus di KPP Pratama Salatiga). *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 3(2), 129–140.
- Harjowiryo, M. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Bendahara Pemerintah dalam Penyetoran Pajak. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(3), 195–217. <https://doi.org/10.33105/itrev.v4i3.156>
- Julianita, D. A., & Sumiati, A. (2016). Hubungan antara Persepsi Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak PBB di Kelurahan Duri Pulo. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 11(1), 1–14. <https://doi.org/10.21009/10.21.009/wahana.011/1.2>
- Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 690.900.327 Tahun 1996, tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/KMK.03/2003, tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Kustiawan, M., Solikin, I., & Zulhaimi, H. (2018). Perguruan Tinggi sebagai Role Model Kepatuhan Bendaharawan Pemerintah dalam Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 10(2), 177–188.

- Mohamad, A., Runtuwarouw, R., & Kambey, J. (2022). Pengaruh Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Tomohon. *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado*, 3(1), 128–136. <https://ejurnal-mapalus-unima.ac.id/index.php/jaim/article/view/2389>
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2021 tentang *Tata Cara Pemberian dan Penggunaan Nomor Identitas Subunit Organisasi Instansi Pemerintah serta Kewajiban Pelaporan Pajak Instansi Pemerintah*
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2021 tentang *Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak, serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Bagi Instansi Pemerintah*
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021, tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/192~pmk.03~2007per.htm>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK.03/2013, tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang *Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah*
- Ramdani, R. F., Faridah, E., & Badriah, E. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaran Bermotor. *Akuntapedia*, 1(1), 72–95.
- Rizkina, M., Adiman, S., & Aliah, N. (2021). Efektivitas Penagihan Pajak Terhadap

Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Orang Pribadi pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Sumut I. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 11(2), 12–26.

Setiawan, D. A. (2021). Benahi Administrasi Pajak Bendahara Pemerintah, Ini Aturan yang Terbit. <https://news.ddtc.co.id/benahi-administrasi-pajak-bendahara-pemerintah-ini-aturan-yang-terbit-31484>

Setiawan, D. A. (2021). Penerapan e-Bupot Unifikasi Instansi Pemerintah, DJP Kebut Sosialisasi. <https://news.ddtc.co.id/penerapan-e-bupot-unifikasi-instansi-pemerintah-djp-kebut-sosialisasi-32747>

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-47/PJ/2021 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Tindak Lanjut Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Bendahara oleh Kantor Pelayanan Pajak*

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang *Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang *Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang *Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Bab VI Kemudahan Berusaha, Bagian Ketujuh Perpajakan, Pasal 112 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM*